

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengkalsifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015).

Pada dasarnya tujuan dari pembangunan ini yaitu dengan memperbanyak pilihan kepada penduduk dimana pilihan-pilihan ini tidak terbatas dan dapat berubah kapan saja, sehingga penduduk bisa memperoleh akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan mata pencaharian yang aman dan sebagainya. Tujuan akhir dari pembangunan ini juga bisa dikatakan untuk menciptakan lingkungan yang dapat memungkinkan masyarakat hidup dengan aman dan nyaman, sehat dan kreatif.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang pada saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara (Rahminta Handayani, 2015). Pembangunan ekonomi yang menggambarkan telah terjadinya peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan sebagai syarat yang di perlukan bagi proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dengan demikian pertumbuhan ekonomi bukanlah gambaran ekonomi sesaat

saja, melainkan suatu proses yang di dalamnya suatu perekonomian yang berubah dari waktu ke waktu.

Salah satu tolak ukur untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah Human Development Index (HDI) atau disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat tiga komponen utama dalam menetapkan IPM yaitu, kualitas hidup materil, kondisi kesehatan penduduk (harapan hidup) dan kondisi pendidikan atau yang dikenal dengan tingkat melek hidup.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Klasifikasi status pembangunan manusia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Klasifikasi Status Indeks Pembangunan Manusia

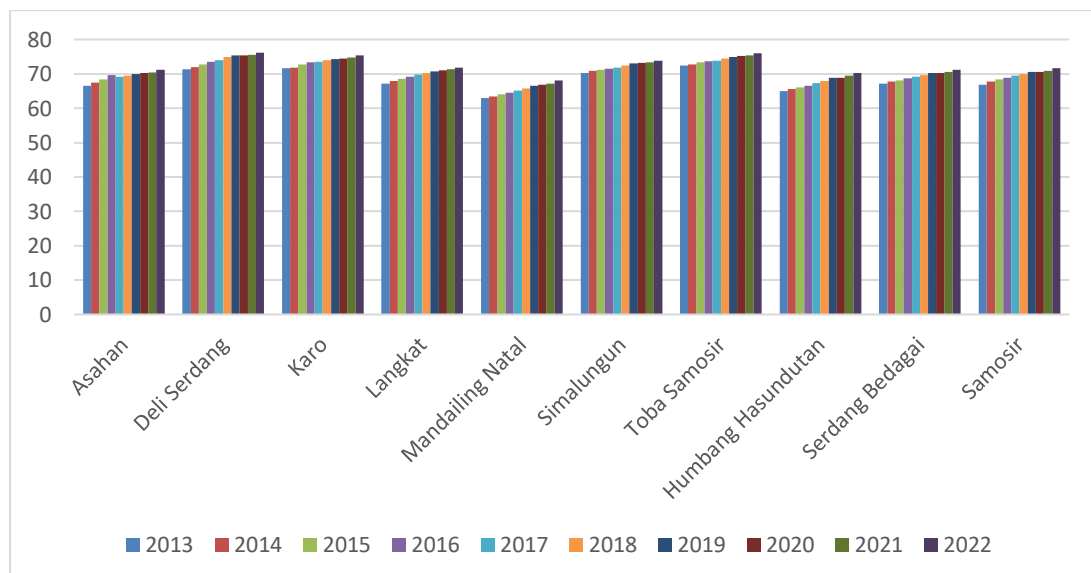
Nilai IPM	Status IPM
< 60	Rendah
< 70	Sedang
< 80	Tinggi
> 80	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara, dimana pembangunan suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan produk domestik bruto tanpa adanya peningkatan pembangunan manusianya sendiri, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi

masyarakatnya (Laisina, Masinambow, dan Rompas, 2015). Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia akan ditentukan oleh tingkat kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan perkapitanya.

Secara administratif, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang terbagi menjadi 33 wilayah, yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota. Pada penelitian ini saya meneliti di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara. Akesibilitas ke 10 kabupaten ini bisa membutuhkan waktu yang lama karena jarak dari kabupaten 1 ke kabupaten lainnya dapat ditempu dengan transportasi darat dan laut. Keberadaan kabupaten ini yang jauh dari wilayah perkotaan sangat berpengaruh terhadap akses pembangunan dan pengembangan sumber daya masyarakat. Kondisi kehidupan masyarakat di kabupaten cenderung mengalami berbagai keterbelakangan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dapat kita lihat Indeks Pembangunan Manusia di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara pada gambar 1.1 di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023

Gambar 1.1 Persentase Indeks Pembangunan Manusia Di 10 Kabupaten Pada Provinsi Sumatera Utara (Dalam Persen)

Berdasarkan dari gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. IPM yang paling banyak mengalami peningkatan dari tahun 2013-2022 yaitu Kabupaten Deli Serdang sebanyak 76.19 persen pada tahun 2022. Dan IPM yang sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2013-2022 yaitu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 68.05 persen pada tahun 2022.

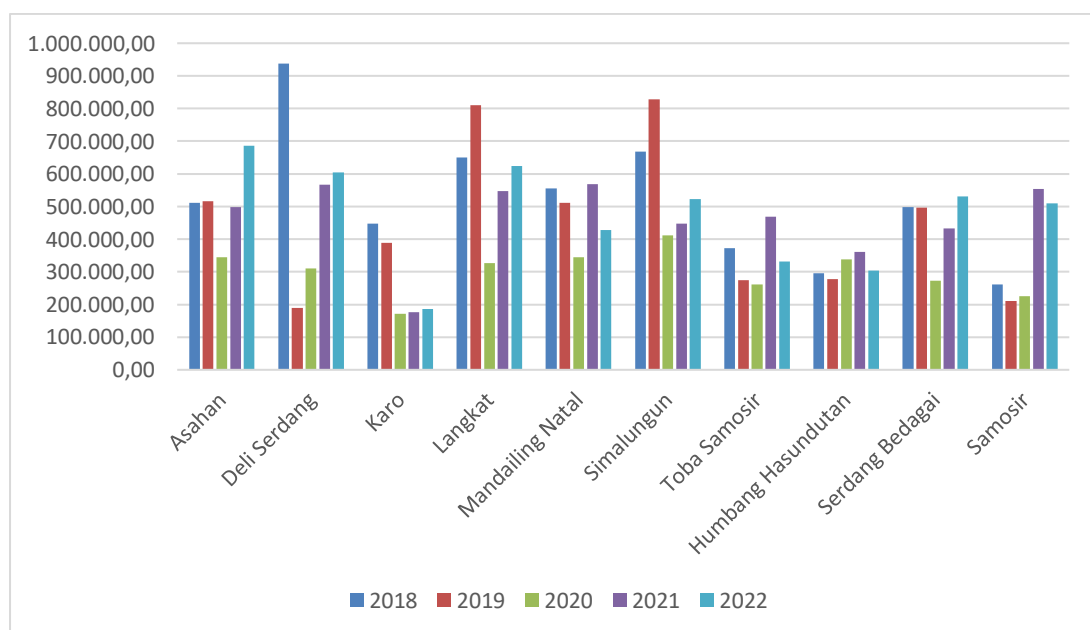
Menurut Todaro (2003) modal manusia (*Human Capital*) memiliki indikator diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan yang merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, keterkaitan antara kesehatan dan pendidikan mencakup perlakuan analisis yang serupa, karena keduanya merupakan bentuk dari modal manusia dampak ganda dari pengeluaran untuk kesehatan terhadap efektifitas sistem pendidikan. Jika modal manusia meningkat maka pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan juga meningkat.

Untuk menghasilkan ketersediaan modal yang berkualitas, peran pemerintah sangat penting dalam mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi, juga tidak kalah pentingnya berperan dalam meningkatkan pembangunan manusia.

Salah satu instrumen kebijakan yang penting ialah APBD dengan pengaturan distribusi anggarannya. Dengan adanya anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD), suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Dalam penelitaian ini realisasi APBD yang digunakan hanya dibatasi pada variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.

Sesuai dengan teori IPM, yang menekankan pentingnya peran pemerintah didalam kedua sektor tersebut. Pemerintah harus mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk kesehatan dari total APBN maupun APBD sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 pasal 49 tentang pendidikan dan UU No. 36 tahun 2009 pasal 171 tentang kesehatan.

Pendidikan sebagai investasi memberikan pengaruh terhadap produktifitas suatu Negara. Dari pengetahuan, keterampilan serta keahlian seseorang sebagai pendidikan akan memiliki kemampuan yang tinggi dalam mencapai tingkat produksi masyarakat. Dengan produksi yang tinggi, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini merupakan suatu indikator adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap bangsa memiliki nilai tambah untuk di investasikan dalam organisasi, semakin berkembang ekonomi suatu negara semakin banyak orang memiliki uang sehingga pasar semakin luas dan hal ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Gambar 1.2 di bawah ini menunjukkan grafik tentang pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara:



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Indonesia, 2023

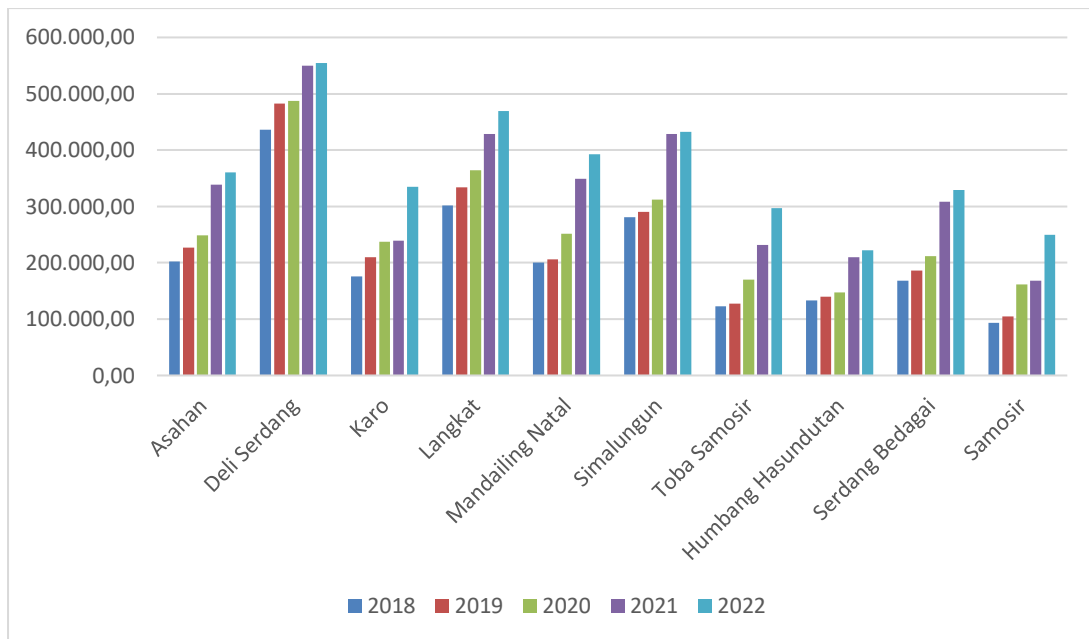
Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Di 10 Kabupaten Pada Provinsi Sumatera Utara 5 Tahun Terakhir (Dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.2 di atas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara 5 tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi yang dimana Kabupaten dengan jumlah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tertinggi yaitu Asahan sebesar 685.668,77 juta rupiah pada tahun 2022. Adapun untuk daerah-daerah lainnya yang sebagian besar terletak di daerah pegunungan dan dataran tinggi sulit akses mempunyai belanja sektor pendidikan yang rendah.

Menurut Todaro (2003) modal manusia (*Human Capital*) memiliki indikator diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan yang merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, keterkaitan antara kesehatan dan pendidikan mencakup perlakuan analitis yang serupa, karena keduanya merupakan bentuk dari modal manusia.

Modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan karena kesehatan adalah faktor penting atas kehadiran di sekolah, anak-anak yang sehat dan lain-lain. Kesehatan yang baik akan meningkatkan prestasi pendidikan seorang anak, dengan kesehatan serta harapan hidup yang tinggi maka akan meningkatkan partisipasi pendidikan untuk anak-anak usia sekolah dimana kesehatan merupakan cerminan dari pendidikan individu.

Gambar 1.3 di bawah ini menunjukkan data tentang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara:



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Indonesia, 2023

Gambar 1.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Di 10 Kabupaten Pada Provinsi Sumatera Utara 5 Tahun Terakhir (Dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.3 di atas pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara 5 tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi yang dimana Kabupaten dengan jumlah pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tertinggi yaitu Deli Serdang sebesar 554.252,06 juta rupiah pada tahun 2022. Adapun untuk daerah-daerah lainnya yang sebagian besar terletak di daerah pegunungan dan dataran tinggi sulit akses mempunyai belanja sektor kesehatan yang rendah.

Sejauh ini telah banyak penelitian mengenai indeks pembangunan manusia terkait dengan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Sanggelorang, Rumat, dan Siwu (2012) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap IPM di Sulawesi Utara sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ipm di Sulawesi Utara.

Pengeluaran Pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan manusia. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan terdapat hasil yang berbeda-beda antar tiap-tiap variabel, dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap penelitian sebelumnya dengan judul: **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI SUMATERA UTARA”** menggunakan data tahun 2013 sampai tahun 2022. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode Analisis Data Panel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besarkah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara?
2. Seberapa besarkah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara?
3. Seberapa besarkah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di 10 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun Manfaat dilaksanakan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, diharapkan dapat lebih memahami pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, sektor kesehatan, terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.
- 2) Bagi institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dalam aspek yang sama maupun pengembangan dari penelitian ini.
- 3) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Serta sebagai bahan informasi dan referensi.